



POHON KINERJA



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERAS USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Jalan HM. Sarbini No. 85 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
Kodepos 54316 Telp. (0287) 384434 Fax. (0287) 384434
Web disperindag.kebumenkab.go.id e-mail: disperindag@kebumenkab.go.id



GAMBARAN UMUM

1. Informasi / Data

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 TAHUN 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kebumen.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adalah:

- a. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor Sekunder dengan perkiraan capaian awal Tahun 2021 PDRB ADHK Sektor Sekunder sebesar 4.118,94 milyar rupiah dan prospek pada akhir perencanaan Tahun 2026 sebesar 5.376,15 milyar rupiah. Sedangkan sasarannya adalah :
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan usaha industri dengan perkiraan capaian awal Tahun 2021 Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian sebesar 8,31% dan prospek pada akhir perencanaan Tahun 2026 sebesar 4,93%.
 - 2) Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat dengan perkiraan capaian awal Tahun 2021 prosentase Koperasi yang sehat sebesar 26,67% dan prospek pada akhir perencanaan Tahun 2026 sebesar 63,33%, dan
 - 3) Meningkatnya Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas dengan perkiraan capaian awal Tahun 2021 Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas sebesar 8,75% dan prospek pada akhir perencanaan Tahun 2026 sebesar 13,22%.
- b. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor Tersier dengan perkiraan capaian awal Tahun 2021 PDRB ADHK Sektor Tersier sebesar 11.080,81 milyar

rupiah dan prospek pada akhir perencanaan Tahun 2026 sebesar 14.462,95 milyar rupiah. Sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya daya saing Perdagangan dengan perkiraan capaian awal Tahun 2021 Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan sebesar 10,30% dan prospek pada akhir perencanaan Tahun 2026 sebesar 4,45%, dan

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan seperti yang terlihat pada pohon masalah dibawah ini:

2.1. Urusan Industri

- a. Masih banyaknya produk Industri yang belum memenuhi standar;

Semakin tingginya persaingan industri saat ini berdampak pada peningkatan daya saing industri di dalam negeri melalui peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, hal ini merupakan peluang bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memenuhi permintaan industri besar, di lain sisi IKM masih menghasilkan produk yang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan seperti SNI, Halal, HKI dan lainnya maka daya saing produk yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah masih sulit menangkap peluang tersebut dan bersaing di pasar global. Belum standardnya produk Industri juga diakibatkan oleh masih rendahnya kemampuan teknis SDM Industri. Hal ini disebabkan rata – rata SDM Industri memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang dimiliki hanya berdasarkan pengalaman atau rutinitas sehari – hari dalam memproduksi. Sehingga produk industri yang dihasilkan memiliki daya saing yang masih rendah. Untuk Industri kreatif, saat ini juga masih belum optimal berkembang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

- b. Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi;

Seiring banyaknya industri di Kabupaten Kebumen, diperlukan ketersediaan SDM Kompetensi yang mampu mendukung operasional industri tersebut. Masih tingginya pengangguran di Kebumen

diharapkan dapat bekerja di industri tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja masih belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat ini, beberapa industri yang melakukan pengembangan usaha di Kebumen masih membutuhkan tenaga kerja kompeten.

- c. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah.

- d. Belum Adanya Sentra-sentra industri dan Kawasan industri diwilayah Kebumen;

Iklim usaha yang kondusif, masih kompetitifnya biaya tenaga kerja, Infrastruktur transportasi dengan mulai terbangunnya Jalan lintas selatan selatan dan tersedianya jalur kereta api double track di wilayah Kebumen diharapkan membuat daya tarik yang kuat bagi industri di wilayah kota kota besar untuk mengalihkan basis produksinya ke wilayah Kebumen. Kondisi riil data dan informasi mengenai keberadaan dan perkembangan industri sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang pada akhirnya memunculkan penyelesaian permasalahan dan kebijakan yang terkait dengan industri.

- e. Kurangnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana industri, serta infrastruktur penunjang yang berwawasan lingkungan;

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam rangka Optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa

teknologi industri bagi IKM serta sistem informasi networking. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri. Pengadaan sarana dan prasarana harus diikuti dengan pembinaan agar tidak timbul kecurangan yang tidak diinginkan. Pengembangan dan Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini telah diatur di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yang akan mendorong pengembangan industri berwawasan lingkungan, serta akan memberikan daya tarik industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

f. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya.

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi. Selain permasalahan diatas, keterkaitan industri satu dengan yang lain masih belum optimal penerapannya, industri pendukung dengan industri lainnya pada satu wilayah regional belum memiliki keterkaitan yang optimal sehingga akselerasi perputaran ekonomi yang dihasilkan belum maksimal. Tingginya ketergantungan bahan baku impor. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi.

Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada industri kecil menengah Non Agro. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah Non Agro disebabkan

karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, sehingga dipengaruhi sebagian besar oleh faktor eksternal industri seperti kurs rupiah, isu – isu global, kontinuitas pasokan, kendala tata niaga berikut peraturan teknis dan lainnya yang sulit Industri dalam negeri antisipasi.

2.2. Urusan Perdagangan

a. Keterbatasan Pemasaran

1) Belum Berpihaknya Regulasi

Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

Dalam bidang dunia usaha, pengertian regulasi bisnis dan bidang ekonomi adalah hal ini adalah aturan yang mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah, regulasi industri, peraturan asosiasi perdagangan, dan lainnya. Dengan kata lain, regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

Belum adanya regulasi untuk menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam beraktivitas pada sebuah perdagangan. Akan sangat rancu jika tidak memiliki peraturan sama sekali.

Belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten serta keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak

2) Panjangnya Rantai Distribusi

Rantai Distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena panjangnya rantai distribusi dari hulu (produsen) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen – pengepul – agen – pedagang besar – pengecer – konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain

panjangnya rantai distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya sistem yang mengatur perdagangan antar Kabupaten. Data ketersediaan atau stok komoditas belum tersedia. Dikarenakan data distributor maupun pelaku usaha di Kabupaten Kebumen masih terbatas.

3) Rendahnya Penggunaan Produk Lokal

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangnya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaannya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing.

4) Keterbatasan Pangsa Ekspor

Tidak selamanya kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan, biasanya sering terjadi hambatan atau masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat didalamnya. Masalah tersebut terbagi dalam dua kelompok utama yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah External antara lain : Kepercayaan Antara

Eksportir Importir, Pemasaran, Keterkaitan Dalam Keanggotaan Organisasi Internasional sedang masalah internal antara lain : Persiapan Teknis, Pembiayaan, Kekurangsempurnaan Dalam Mempersiapkan Barang, Kebijaksanaan Dalam Pelaksanaan Ekspor Impor

Kelancaran transaksi ekspor impor sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang mendasarinya. Peraturan-peraturan yang apabila sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekeliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha di luar negeri. Diperlukan penjelasan yang cukup tentang latar belakang perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak memaklumi

b. Keterbatasan Sarana Prasarana

1) Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangnya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaannya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu

berkembang dan bersaing.

Kelemahan :

- a) Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
- b) Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
- c) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
- d) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
- e) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
- f) Kurang representatifnya pasar tradisional / pasar rakyat.
- g) Kurangnya sarana dan prasarana pasar.
- h) Masih belum optimalnya kinerja UPTD Metrologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.

2) Keterbatasan Permodalan

Modal usaha terdiri dari 2 jenis modal usaha yaitu modal sendiri dan modal asing. Sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan laba, laba yang belum digunakan. Sedangkan modal asing adalah modal yang diperoleh dari pihak luar usaha yang biasanya diperoleh dari pinjaman oleh suatu lembaga. Keuntungan modal pinjaman adalah pengusaha dapat mendapatkan jumlah modal yang tidak terbatas, maksud dari tidak terbatas adalah ketersediaan dana dalam jumlah banyak. Sumber modal asing dapat diperoleh dari beberapa hal yaitu:

- a) Pinjaman dari dunia perbankan.
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan penggadaian, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c) Pendanaan dari lembaga non keuangan

Keterbatasan modal dari pelaku usaha menjadi salah satu penyebab pertumbuhan usaha sektor ini terkendala. Lembaga keuangan juga tetap selektif dalam memilih calon debitur mengingat adanya risiko atas perguliran dana. Jadi, pengusaha juga tidak bisa langsung meningkatkan kapasitasnya

Modal sebagai mana kita ketahui adalah merupakan salah

satu faktor produksi, tetapi hingga sekarang diantara para ahli ekonomi sendiri belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang di sebut dengan modal itu dan tampaknya dalam sejarahnya, pengertian dari modal itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu.

3) Keterbatasan Penguasaan Tehnologi

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah

Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masalah teknis saat Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berjalan nanti. Kendalanya lebih kepada infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum maksimal karena OSS mengandalkan koneksi internet. Sistem TI yang dimaksud lebih kepada ketersediaan akses internet yang memadai di daerah. Ada wilayah yang infrastruktur TI-nya masih lemah, sehingga di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak bisa masuk. Online Single Submission Jadi Pertaruhan Besar di Hadapan Investor Asing karena jika ada suatu daerah yang terkendala masalah teknis seperti itu, harus menunggu Dinas Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur TI untuk memperluas jaringan di daerah-daerah. Selain itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman di daerah menyangkut legalitas dari sertifikat register perusahaan yang di keluarkan OSS. Sehingga masih dibutuhkan adanya penyempurnaan sistem baik dari pemerintah dan dunia usaha terkait kesiapan sistem dan

infrastrukturnya maupun pemahaman atas kebijakan tersebut.

2.3. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan urusan koperasi di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Kelembagaan

1) Belum Berpihaknya Regulasi

Belum adanya regulasi untuk menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam beraktivitas pada sebuah perdagangan. Akan sangat rancu jika tidak memiliki peraturan sama sekali. Salah satu upayanya adalah dorongan agar para pelaku UMKM beralih ke digital dengan dukungan regulasi yang berpihak ke UMKM.

Untuk mendorong UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia ke arah digital, sudah menjadi keharusan. Inklusi ke digital menjadi solusi dan dorongan agar UMKM tak hanya adaptasi tapi juga mengembangkan usahanya. Pembuktian tersebut berupa penerbitan regulasi baru seputar penyederhanaan perizinan,

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelemahan mendasar UMKM selama ini, selain pendampingan yang minim dan peluang masuk pasar yang terbatas, juga akses ke perbankan yang sangat rendah.

2) Rendahnya Mutu SDM

Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi; Seiring banyaknya industri di Kabupaten Kebumen, diperlukan ketersediaan SDM Kompetensi yang mampu mendukung operasional industri tersebut. Masih tingginya pengangguran di Kebumen diharapkan dapat bekerja di industri tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja masih belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat ini, beberapa industri yang melakukan pengembangan usaha di Kebumen masih membutuhkan tenaga kerja kompeten.

3) Kurangnya Mutu Pengawasan/Evaluasi

Jaminan mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan

mutu harus dipenuhi. Secara teknis jaminan mutu dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang sistematis dan terencana yang diterapkan dalam pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa data yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang dapat diterima oleh pengguna. Berdasarkan hal tersebut belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan disebabkan oleh keterbatasan SDM dan sarana prasarana laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk, sehingga memberikan dampak belum semua permintaan pelayanan dapat terpenuhi. Masih adanya dunia industri yang belum memahami jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalam kategori SNI, sehingga kesulitan didalam permintaan pelayanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk. Keberadaan BPSMB sesuai fungsi sebagai laboratorium Pengujian, Laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk belum sepenuhnya dikenal oleh dunia usaha.

4) Keterbatasan Akses Pasar

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangnya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaannya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman.

Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing.

b. Keterbatasan Sarana Prasarana

1) Keterbatasan Permodalan

Modal diartikan sebagai hasil produksi yang di gunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya pengertian modal mengarah pada sifat non-physical, dalam arti modal di tekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal. Ada beberapa prinsip yang harus di patuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu:

- a) Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang-orang sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar ,maju dan punya daya saing dengan perusahaan-perusahaan besar.
- b) Perkembangan koperasi dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.
- c) Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari

koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus .

- d) Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
- e) kurangan dana/modal dalam koperasi merupakan masalah yang sangat umum di perkoperasian di Indonesia. Hal itu disebabkan diantaranya kelemahan dalam pembentukan modal sendiri,kelemahan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi,kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan

2) Keterbatasan Penguasaan Tehnologi

Kurangnya Pemahaman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan secara online. Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masalah teknis saat Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berjalan nanti. Kendalanya lebih kepada infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum maksimal karena OSS mengandalkan koneksi internet. Sistem TI yang dimaksud lebih kepada ketersediaan akses internet yang memadai di daerah. Ada wilayah yang infrastruktur TI-nya masih lemah, sehingga di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak bisa masuk. Online Single Submission Jadi Pertaruhan Besar di Hadapan Investor Asing karena jika ada suatu daerah yang terkendala masalah teknis seperti itu, harus menunggu Dinas Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur TI untuk memperluas jaringan di daerah-daerah. Selain itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman di daerah menyangkut legalitas dari sertifikat register perusahaan yang di keluarkan OSS. Sehingga masih dibutuhkan adanya

penyempurnaan sistem baik dari pemerintah dan dunia usaha terkait kesiapan sistem dan infrastrukturnya maupun pemahaman atas kebijakan tersebut.

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah.

3. POHON KINERJA

3.1. Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

3.1.1. Meningkatnya koperasi sehat

Dengan Koperasi yang sehat dapat memperkuat modalnya, mengelola aset produktif dengan baik, dan memiliki manajemen yang efisien. Likuiditas yang memadai dan pertumbuhan yang berkelanjutan juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kesehatan koperasi. Nilai-nilai koperasi yang kuat dan komitmen terhadap prinsip-prinsip koperasi juga turut berkontribusi pada kesuksesan koperasi.

3.1.2. Meningkatnya Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas

Peningkatan kualitas UKM merupakan salah satu kunci untuk memperkuat perekonomian nasional. Dukungan pemerintah melalui insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan izin berusaha, serta program pemulihan dan permodalan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UKM.

3.1.3. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren positif, khususnya dalam sektor industri. Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang tumbuh pesat. Pertumbuhan perdagangan mencerminkan aktivitas bisnis dan konsumsi masyarakat.

3.1.4. Meningkatnya daya saing perdagangan

Dalam upaya meningkatkan daya saing perdagangan perlu mengambil beberapa langkah strategis yaitu dengan Peningkatan kualitas produk industri dalam negeri sesuai dengan standar pasar; Pengembangan inovasi teknologi digital menjadi prioritas. Penerapan ekonomi digital secara luas di semua sektor produktif membantu

meningkatkan daya saing, Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital, termasuk akses internet dan teknologi informasi yang terjangkau. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi di era digitalisasi."

3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*)

Ultimate Outcome (sasaran OPD)	Outcome (Sasaran Program)	CSF (Intermediete Outcome) Sasaran Kegiatan (apabila beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)
Meningkatnya PDRB ADHK sektor Perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Meningkatnya Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT
		Meningkatnya Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi
		Meningkatnya Dokumen Informasi Industri
Meningkatnya PDRB ADHK sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing perdagangan	Meningkatnya Nilai pendapatan retribusi pasar
		Menekan Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar
		Meningkatnya Nilai ekspor perdagangan
		Meningkatnya Persentase (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertera
		Meningkatnya Cakupan Pemasaran Produk UMKM
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
		Meningkatnya kompetensi ASN
Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah		
Meningkatkan Prosentase koperasi sehat dan usaha Mikro	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	Meningkatnya Prosentase Koperasi Sehat
		Meningkatnya Persentase

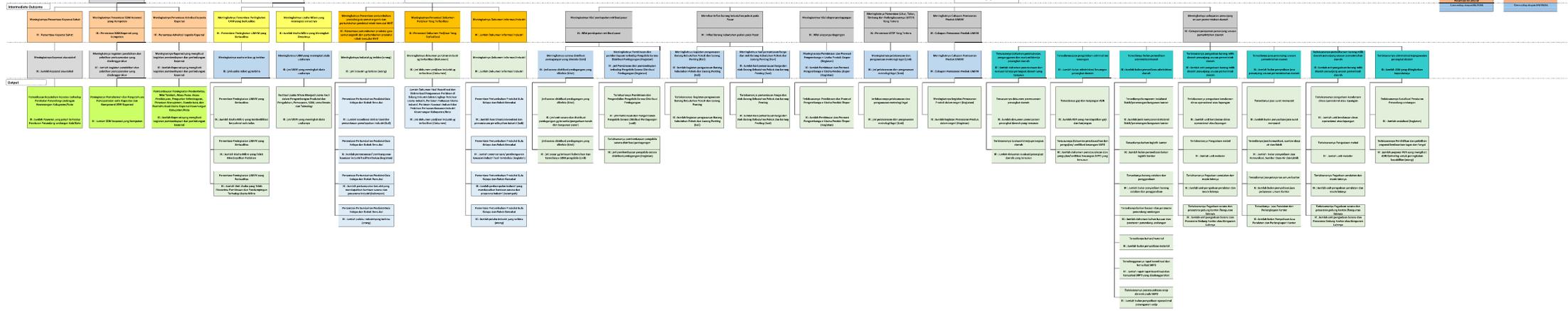
Ultimate Outcome (sasaran OPD)	Outcome (Sasaran Program)	CSF (Intermediete Outcome) Sasaran Kegiatan (apabila beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)
Kecil Menengah yang Berkualitas		Advokasi kepada Koperasi
	Meningkatnya jumlah koperasi sehat Meningkatnya jumlah UMKM berkualitas	Meningkatnya Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas Meningkatnya Usaha Mikro yang meningkat omsetnya
	Meningkatnya kompetensi ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN (Crosscutting dengan BKPSDM)
	Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan Pembangunan daerah (Crosscutting dengan BAPPEDA)

3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

CSF Sasaran Kegiatan (beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)	KONDISI YANG DIPERLUKAN Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	Meningkatnya Industri yang terbina (orang)
Meningkatnya Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi	Meningkatnya dokumen perijinan industri yang terfasilitasi (Dokumen)
Meningkatnya Dokumen Informasi Industri	Meningkatnya Dokumen Informasi Industri
Meningkatnya Nilai pendapatan retribusi pasar	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang dikelola (Unit)
	Meningkatnya Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan)
Menekan Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	Meningkatnya kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (Kali)
	Meningkatnya hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari)
Meningkatnya Nilai ekspor perdagangan	Meningkatnya Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor (Kegiatan)
Meningkatnya Persentase (Ukur, Takar, Timbang dan	Meningkatnya pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit)

CSF Sasaran Kegiatan (beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)	KONDISI YANG DIPERLUKAN Sasaran Kegiatan
Perlengkapannya (UTTP) yang Tertera	
Meningkatnya Cakupan Pemasaran Produk UMKM	Meningkatnya Cakupan Pemasaran Produk UMKM
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
	Tersedianya bulan penyediaan administrasi daerah
	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah
Meningkatnya Prosentase Koperasi Sehat	Meningkatnya koperasi akuntabel
Meningkatnya Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	Meningkatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan
Meningkatnya Persentase Advokasi kepada Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Meningkatnya Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas	Meningkatnya usaha mikro yg terbina
Meningkatnya Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	Meningkatnya UKM yang meningkat skala usahanya
Meningkatnya Kapasitas ASN (Crosscutting dengan BKPSDM)	Meningkatnya kompetensi ASN
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan Pembangunan daerah (Crosscutting dengan BAPPEDA)	Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah

Adapun Pohon Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada diagram berikut:



3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Ultimate Outcome (sasaran OPD)	Outcome (Sasaran Program)	Intermediete Outcome Sasaran Kegiatan (apabila beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
Meningkatnya PDRB ADHK sektor Perindustrian				Prosentase Peningkatan PDRB ADHK Sektor Perindustrian
	Meningkatnya pertumbuhan usaha industri			Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian
		Meningkatnya Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	Meningkatnya Industri yg terbina (orang)	Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT
		Meningkatnya Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi	Meningkatnya dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen)	Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi
		Meningkatnya Dokumen Informasi Industri	Meningkatnya Dokumen Informasi Industri	Jumlah Dokumen Informasi Industri
Meningkatnya PDRB ADHK sektor Perdagangan				Prosentase Peningkatan PDRB ADHK Sektor Perdagangan
	Meningkatnya daya saing perdagangan	Meningkatnya Nilai pendapatan retribusi pasar	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang dikelola (Unit)	
			Meningkatnya Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan)	Nilai pendapatan retribusi pasar

Ultimate Outcome (sasaran OPD)	Outcome (Sasaran Program)	Intermediete Outcome Sasaran Kegiatan (apabila beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
		Menekan Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	Meningkatnya kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (Kali)	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (Kali)
			Meningkatnya hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari)	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari)
		Meningkatnya Nilai ekspor perdagangan	Meningkatnya Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor (Kegiatan)	Nilai ekspor perdagangan
		Meningkatnya Persentase (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertera	Meningkatnya pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit)	Persentase UTTP Yang Tertera
		Meningkatnya Cakupan Pemasaran Produk UMKM	Meningkatnya Cakupan Pemasaran Produk UMKM	Cakupan Pemasaran Produk UMKM
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun

Ultimate Outcome (sasaran OPD)	Outcome (Sasaran Program)	Intermediete Outcome Sasaran Kegiatan (apabila beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			daerah	
			Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah
			Tersedianya bulan penyediaan administrasi daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi daerah
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya
Meningkatkan Prosentase koperasi sehat dan usaha Mikro Kecil Menengah yang Berkualitas	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	Meningkatnya Prosentase Koperasi Sehat	Meningkatnya koperasi akuntabel	Jumlah koperasi akuntabel
		Meningkatnya Persentase SDM Koperasi	Meningkatnya kegiatan pendidikan dan	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan

Ultimate Outcome (sasaran OPD)	Outcome (Sasaran Program)	Intermediete Outcome Sasaran Kegiatan (apabila beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
		yang Kompeten	pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	perkoperasian yang diselenggarakan
		Meningkatnya Persentase Advokasi kepada Koperasi	Meningkatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
	Meningkatnya jumlah koperasi sehat Meningkatnya jumlah UMKM berkualitas	Meningkatnya Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas	Meningkatnya usaha mikro yg terbina	jml usaha mikro yg terbina
		Meningkatnya Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	Meningkatnya UKM yang meningkat skala usahanya	jml UKM yang meningkat skalanya

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

CASECADING

MSD/
Mewajibkan Kabupaten Kebumen Zersahur, Mandiri, dan/atau Berusaha Rakyat.

3. Menjabarkan daya yang elementer dalam modul pengembangan potensi sumber daya alam, perikanan dan kehutanan hasil yang berkeadilan dengan elemen berkeadilan.

